

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Investasi merupakan modal penting bagi negara-negara berkembang, karena memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan produksi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada tiga jenis pengeluaran investasi. Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial mencakup rumah baru yang seseorang beli untuk tempat tinggal yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Investasi persediaan yaitu mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses dan barang jadi (Mankiw, 2007: 476).

Sektor industri manufaktur diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri selalu memiliki “dasar tukar” (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya. Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang, dan

investor) lebih suka berkecimpung dalam bidang industri karena sektor ini memberikan marjin keuntungan yang lebih menarik (Dumairy, 1997: 227).

Pemerintah melakukan berbagai upaya mendorong perkembangan sektor tersebut, yang bertendensi menyebabkan meningkatnya kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan, terutama pada sektor industri. Selain bertumpu pada pembiayaan internal, pemerintah juga berusaha untuk menarik secara lebih ekspansif pembiayaan eksternal berupa penanaman modal asing dan utang luar negeri sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan. Karena terbatasnya dana, pemerintah perlu menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Jamli dan Firmansyah, 1998: 51).

Upaya untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, pemerintah mengatur dalam UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 11 dan UU No. 12 tahun 1970 dan kebijakan deregulasi bidang investasi, seperti Paket 6 Mei 1986, Pakto 1993, PP No. 20 tahun 1994. Pemerintah menata kembali kebijakan peraturan penanaman modal yang akan masuk di Indonesia dengan mengeluarkan UU RI No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU yang terbaru ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta kemudahan perizinan dalam berinvestasi untuk investor lokal maupun asing. Dampak dari peraturan pemerintah inilah maka realisasi investasi sektor manufaktur di Indonesia mengalami perkembangan yang seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 : Realisasi Investasi Sektor Manufaktur di Indonesia tahun 1992-2012**

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Miliar Rp)	Proyek	Nilai (Juta US\$)
1992	232	19.079,20	190	5.669,50
1993	282	24.032,10	182	3.422,80
1994	405	31.921,70	293	18.738,80
1995	360	43.341,80	454	26.892,10
1996	314	59.217,70	460	16.075,00
1997	304	79.334,30	450	23.017,30
1998	147	44.908,00	410	8.388,20
1999	126	46.745,50	439	6.929,20
2000	200	83.142,10	496	10.707,40
2001	141	44.387,30	425	5.148,30
2002	100	15.851,40	331	3.252,60
2003	108	40.442,70	282	6.457,40
2004	94	20.644,50	319	6.336,40
2005	148	20.932,00	336	3.506,50
2006	98	13.152,20	361	3.604,50
2007	101	26.289,80	390	4.697,00
2008	189	15.914,80	495	4.515,20
2009	158	19.434,30	474	3.831,10
2010	419	25.612,60	1091	3.337,40
2011	706	38.533,80	1643	6.789,50
2012	714	49.889,10	1714	11.769,90

Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sektor manufaktur dari tahun 1992 sampai tahun 2012 juga berfluktuasi. Pada tahun 1992 hingga tahun 1997 nilai realisasi PMDN mencapai Rp 79.334,30 miliar. Penurunan nilai realisasi PMDN yang cukup rendah terjadi tahun 1998 sebesar Rp 44.908,00 miliar dan pada tahun 2006 sebesar Rp 13.152,20 miliar hal ini disebabkan oleh terjadinya krisis moneter 1998 dan belum pulihnya kondisi keamanan pasca terjadinya bom Bali kedua. Selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 meningkat terus hingga Rp 49.889,10 miliar dengan 714 proyek.

Sementara untuk nilai realisasi Penanaman Modal Asing sektor manufaktur mengalami fluktuasi dari tahun 1992 sampai tahun 2012. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 1998 sebesar 8.388,20 juta US \$ dan pada tahun 1999 sebesar 6.929,20 juta US \$ hal ini dikarenakan terjadi krisis moneter yang berdampak pada tingkat pengembalian investasi menjadi tidak pasti sebagai akibat fluktuasi nilai tukar yang cukup tinggi. Selain itu juga diperparah dengan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 nilai realisasi PMA sangat fluktuatif baik jumlah proyek dan nilai investasinya, terkadang terjadi peningkatan yang cukup besar tetapi juga mengalami penurunan.

Salah satu indikator yang mempengaruhi investasi adalah Produk Domestik Bruto, karena secara umum investasi tergantung pada hasil *output* yang diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi (Samuelson dan Nordhaus, 1992: 136). Sesungguhnya dari pendekatan pengeluaran dalam penghitungan pendapatan nasional, telah dapat mengetahui penggunaan dari Produk Domestik Bruto tersebut. Konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi atau pembentukan modal tetap, dan ekspor neto, semuanya merupakan permintaan terhadap barang dan jasa dan oleh karena itu juga merupakan macam penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dengan kata lain Produk Domestik Bruto (PDB) itu digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan ekspor neto (Suparmoko: 1994: 20-21). Adapun data Produk Domestik Bruto Indonesia selama tahun 1992-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2: Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1992-2012 (Miliar Rp)**

Tahun	Produk Domestik Bruto		
	Harga Konstan*)	Harga Berlaku	Growth (%)
1992	1.073.608,55	282.394,90	7,2
1993	1.151.488,92	329.776,11	7,3
1994	1.238.311,95	382.219,70	7,5
1995	1.342.285,06	454.514,10	8,4
1996	1.444.873,04	532.568,00	7,6
1997	1.512.780,23	627.695,40	4,7
1998	1.314.201,74	955.753,50	-13,1
1999	1.324.598,78	1.099.731,60	0,8
2000	1.389.769,90	1.389.769,90	4,9
2001	1.440.405,70	1.646.322,00	3,6
2002	1.505.216,40	1.821.833,40	4,5
2003	1.577.171,30	2.013.674,60	4,8
2004	1.656.516,70	2.295.826,20	5,0
2005	1.750.815,20	2.774.281,20	5,7
2006	1.847.126,70	3.339.216,80	5,5
2007	1.964.327,30	3.950.893,20	6,3
2008	2.082.456,10	4.948.688,40	6,0
2009	2.178.850,40	5.606.203,40	4,6
2010	2.314.458,80	6.446.851,90	6,2
2011	2.464.566,10	7.419.187,10	6,5
2012	2.618.938,40	8.229.439,40	6,3

Keterangan: \*) Berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Sumber: *World Bank*, [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada periode tahun 1990an rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 8,4 % per tahun. Namun pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis, penurunan terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu tercatat minus 13,1 % dikarenakan krisis moneter. Selanjutnya pada tahun 1999 hingga tahun 2007 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 6,0% per tahun. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 4,6% per tahun penurunan ini

diakibatkan dari krisis global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mencapai rata-rata 6% pertahun.

Tingkat suku bunga yang kondusif sering dijadikan pemerintah sebagai instrumen kebijakan untuk menarik minat masyarakat dalam menanamkan modalnya. Tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor yang signifikan bagi investor untuk melihat untung rugi proyek-proyek investasi yang akan dilakukan (Jamli Ahmad dan Firmansyah, 1998: 54). Dalam berinvestasi para investor sangat dipengaruhi oleh suku bunga, karena untuk melakukan penanaman modal bagi investasinya maka harus memiliki dana pinjaman, sedangkan dana pinjaman dikenai dengan biaya yang disebut bunga (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 137). Semakin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga mungkin kecil. Dengan demikian, tingkat bunga dapat mempengaruhi masyarakat dalam memutuskan untuk berinvestasi atau membatalkannya (Nopirin, 1992: 71).

Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar dari atau sama dengan suku bunga (Sukirno, 1994: 125). Oleh karena itu, keputusan investasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga hal ini sesuai dengan teori-teori investasi yang di keluarkan oleh para ahli ekonomi (Ahmad Jamli dan Firmansyah, 1998: 54). BI rate digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat suku bunga, karena besarnya BI rate akan direspon oleh bank-bank umum yang mempengaruhi perekonomian. Adapun suku bunga kredit rupiah menurut kelompok bank umum pada tahun 1992-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3: Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank Umum tahun 1992-2012 (persen)**

Tahun	Suku Bunga	
	Nominal	Riil
1992	19,21	11,71
1993	15,80	6,10
1994	14,90	6,40
1995	16,10	6,70
1996	16,40	8,40
1997	17,30	11,10
1998	23,20	-35,20
1999	22,93	2,43
2000	16,59	12,89
2001	17,90	6,40
2002	17,82	5,92
2003	15,68	9,08
2004	14,05	7,85
2005	15,66	5,16
2006	15,10	2,00
2007	13,01	6,61
2008	14,40	4,60
2009	12,96	8,16
2010	12,28	7,18
2011	12,04	6,64
2012	11,27	6,97

Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa suku bunga riil pada tahun 1992 sampai tahun 1998 mengalami fluktuasi hingga minus 35,2% karena pada tahun tersebut Indonesia mengalami krisis ekonomi. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2012 suku bunga berfluktuasi yang disebabkan oleh belum pulihnya kondisi perekonomian domestik dari krisis keuangan global.

Faktor lain yang mempengaruhi investasi adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam belanja negara. Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan juga untuk fungsi ekonomi. Secara umum peningkatan belanja

pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek. Sementara itu, belanja pada fungsi ekonomi dialokasikan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi. Walaupun menunjukkan peningkatan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi ini tidak lebih besar daripada fungsi pelayanan umum (Wahyuningtyas, 2010: 22).

Pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur, seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya, peningkatan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial (Wahyuningtyas, 2010: 38). Adapun data mengenai realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1992-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.4: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Indonesia tahun 1992-2012 (Miliar Rp)**

Tahun	Realisasi Pengeluaran Pemerintah	
	Nominal	Riil*)
1992	44.129,53	1.677,93
1993	50.269,63	1.757,68
1994	55.228,81	1.787,34
1995	57.299,81	1.690,26
1996	66.682,34	1.807,11
1997	92.804,38	2.236,25
1998	167.555,53	2.304,75
1999	229.108,97	2.760,35
2000	282.585,75	2.825,86
2001	341.563,00	2.988,30
2002	322.180,00	2.662,64
2003	376.505,00	2.948,36
2004	427.177,00	3.082,09
2005	509.632,00	3.215,34
2006	667.129,00	3.689,87
2007	757.650,00	3.767,53
2008	985.731,00	4.148,70
2009	937.382,00	3.643,15
2010	1.042.117,00	3.741,89
2011	1.294.999,00	4.302,32
2012	1.491.410,00	4.746,69

Keterangan: \*) Berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun 1992 terus meingkat hingga tahun 2012 pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1.491.203 miliar. Penurunan pengeluaran pemerintah hanya terjadi pada tahun 2002 dan 2009, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya terus meningkat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap investasi di Indonesia.
- 2) Bagaimanakah pengaruh suku bunga terhadap investasi di Indonesia.
- 3) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi di Indonesia.
- 4) Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Bruto, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi di Indonesia.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap investasi di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap investasi di Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi di Indonesia.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi dunia keilmuan

Pembahasan ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baik praktis maupun teoritis dan sebagai informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk bahan perbandingan.

2) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi khususnya dalam mengoptimalkan investasi.

3) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **1.5. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat rumuskan formulasi hipotesis sebagai berikut:

- 1) Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap investasi di Indonesia.
- 2) Suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi di Indonesia.
- 3) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap investasi di Indonesia.
- 4) Produk Domestik Bruto, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini akan meliputi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga memuat hipotesis penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori investasi, teori pendapatan nasional, teori suku bunga dan teori pengeluaran pemerintah serta penelitian-penelitian serupa. Bagian ini akan menyajikan penjelasannya secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan urutan terbentuknya model empiris yang digunakan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, metode analisis data, uji McKinnon White-Davidson, uji asumsi klasik, dan uji statistik.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis data dan penjelasannya. Uraian tersebut meliputi hasil uji McKinnon White-Davidson, hasil uji asumsi klasik dan hasil uji statistik.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang diperoleh dari bab IV.